

Fraksi PAN Setuju Raperda Pelaksanaan APBD Pangandaran TA 2021 Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Anton atong sugandhi - PANGANDARAN.OPINIPUBLIK.ID

Jun 30, 2022 - 00:19



PANGANDARAN -Dengan ucapan “bismillahirrohmannirrohim” Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 untuk dibahas lebih detil serta komperhensif pada forum pembahasan tingkat selanjutnya .

Demikian disampaikan Alif Suhendi dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pangandaran dalam pandangan umumnya, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (30/06/2022).

Dikatakannya bahwa, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat memahami bahwa Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun 2021 dilaksanakan dalam konteks memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Namun demikian, Fraksi Partai Amanat Nasional memandang bahwa peraturan perundang-undangan mengatur penyusunan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD semata-mata didasarkan pada kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dalam hal ini, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat memahami betul bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mekanisme dan tahapan pembahasan ini akan bermuara pada Rapat Paripurna penetapan laporan keterangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun 2021 dalam bentuk penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten pangandaran.

Selanjutnya, izinkanlah Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pandangan umum atas rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan yang terangkum dalam pokok-pokok urgensi berdasarkan analisa dan kajian yang tersirat maupun tersurat," kata Alif.

Menurutnya, secara umum APBD tahun 2021 telah dapat terealisasi sesuai dengan Perda APBD 2021. walau dalam masa pandemi sehingga menimbulkan banyak refocusing atau penyesuaian anggaran, hal ini berdampak pada terhambatnya program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Maka dari itu kami berharap kepada pemerintah daerah untuk mencermati kembali dalam pembahasan selanjutnya sebagai bahan perbaikan.

Sebagai produk hukum yang memiliki kedudukan tertinggi di daerah, Peraturan Daerah (Perda) dalam hal ini Perda APBD harus benar-benar menjadi acuan pokok dalam melaksanakan proses pembangunan di kabupaten pangandaran. Mengapa?...ya karena satu sen pun rupiah dalam APBD adalah dana masyarakat yang diamanatkan kepada pemangku kebijakan," tandasnya.

Tambah Alif, dengan mengucapkan "bismillahirrohmannirrohim" kami, Fraksi Partai Amanat Nasional menerima Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 untuk dibahas lebih detail serta komprehensif pada forum pembahasan tingkat selanjutnya," Sebutnya.

Parigi, 30 juni 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pangandaran Fraksi Partai Amanat Nasional.

Hamdi (ketua). Alif Suhendi S.Ip., M.Si (sekretaris). ** (Anton AS)